

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Adam Podgorecki & Christopher J. Whelan, 1987, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B. Arief Sidharta, 1996, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hendry S. Siswosoedirjo, 2008, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, Visimedia, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kristian Widya Wicaksono, 2006, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Marbun, S.F., dan Moh. Mahfud MD., 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, dkk, 1989, *Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum*, Yayasan LBH, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1990, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Angkasa, Bandung.
- , 2010, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- , 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- , 1989, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soehino, 1984, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1990, *Hidup Masyarakat dan Tertib Masyarakat Manusia*, FISIP-UNAIR, Surabaya.

Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Yogyakarta.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung.

W.J.S. Poerwadarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zulkarimein Nasution, 1989, *Prinsip-Prinsip Komunikasi Untuk Penyuluhan*, FE-UI, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

C. JURNAL / MAKALAH / SKRIPSI / TESIS / DISERTASI :

Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.

M. Budi Mulyadi, “Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.4 No.1, Juni 2018.

Nurwigati, “Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Mewujudkan Fungsi Izin sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat yang Membahayakan Lingkungan”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17 No 1, Juni 2010.

Septi Wahyu Sandiyoga, “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Sjachran Basah, “Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan”, *Makalah Pada Seminar Hukum Lingkungan*, Diselenggarakan Oleh KLH bekerjasama dengan *Legal Mandate Compliance and Enforcement Program* dari BAPEDAL, Jakarta, 1996.

D. INTERNET / WEBSITE :

Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022, pukul 20.35 wib.